

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1.1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. HDI menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Kato dkk, 2021:102).

IPM dijelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS: 2021).

Menurut Tulus 2003 (dalam Gandasari dan Sayifullah, 2016:244) IPM atau dikenal dengan sebutan Human Development Index (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposit yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar kehidupan.

2.1.1.2. Sejarah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI)

HDI (*Human Development Index*) diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Universitas Yale dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu, indeks ini dipakai oleh UNDP pada laporan HDI tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan.

HDI (*Human Development Index*) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju. Negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. HDI digunakan untuk melakukan pemeringkat kinerja pembangunan berbagai negara di dunia. Berdasarkan HDI nya negara-negara di dunia dikelompok menjadi empat, yaitu (Kato dkk, 2021:103):

1. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low human development*), bila memiliki nilai HDI antara 0,350-0,549.
2. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang sedang (*medium human development*), bila memiliki nilai HDI antara 0,550-0,699.
3. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*), bila memiliki nilai HDI antara 0,700-0,799.
4. Kelompok negara dengan tingkat pembangunan yang sangat tinggi (*very high human development*), bila memiliki nilai HDI anatar 0,800-1,000.

2.1.1.3. Menghitung Indeks Komponen Human Development Index (HDI)

Setiap komponen Human Development Index HDI distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

Rumus yang digunakan sebagai berikut (Kato dkk, 2021:103):

- a. Dimensi Kesehatan

$$\text{Indeks Kesehatan} = (\text{AHH} - \text{AHH min}) / (\text{AHH maks} - \text{AHH min})$$

- b. Dimensi Pendidikan

$$\text{Indeks HLS} = (\text{HLS} - \text{HLS min}) / (\text{HLS maks} - \text{HLS min})$$

$$\text{Indeks RLS} = (\text{RLS} - \text{RLS min}) / (\text{RLS maks} - \text{RLS min})$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = (\text{indeks HLS} + \text{Indeks RLS}) / 2$$

- c. Dimensi pengeluaran

$$\text{In pengeluaran} = (\text{In Pengeluaran} - \text{In pengeluaran min}) / (\text{In Pengeluaran maks} - \text{In Pengeluaran min})$$

2.1.1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut (BPS: 2021) manfaat indeks pembangunan manusia yaitu :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.2. Angka Harapan Hidup

2.1.2.1. Pengertian Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat (BPS:2021).

Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk melihat kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, dimana tinggi rendahnya Angka Harapan Hidup menggambarkan kemajuan ekonomi masyarakat (Bancin dan Usman, 2020:18).

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pemberantasan kemiskinan (Haryadi dan Ismawati, 2018:144).

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan (Haryadi dan Ismawati, 2018:144).

2.1.2.2. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan sebagai komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia antara lain dengan menggunakan Angka Harapan Hidup. Titik permasalahan

sebenarnya yang seringkali muncul di permukaan adalah dipandangya Angka Harapan Hidup ini sebagai variabel yang mewakili kondisi kesehatan secara menyeluruh pada suatu komunitas. Angka Harapan Hidup digunakan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan pencerminan dari berbagai indikator kesehatan. Memang belum semua pihak setuju dengan penyerdehanaan komponen ini. Namun hingga sekarang, komponen kesehatan tetap masih lebih valid diwakili oleh Angka Harapan Hidup tersebut (Asang, 2012:119).

Para pakar di bidang ini menjelaskan bahwa Angka Harapan Hidup merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, gaya hidup, masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Sebab itu, Angka Harapan Hidup tetap relevan dipandang mewakili indikator lama hidup dan selanjutnya digunakan dalam perhitungan sebagai komponen kesehatan dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia. Upaya untuk mendapatkan Angka Harapan Hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam penentuan (pengukuran) IPM, sesungguhnya dapat dihitung sendiri dengan metode demografi, namun dapat dilakukan dengan data yang telah tersedia pada lembaga formal seperti BPS, UNDP atau perguruan tinggi yang bergerak di bidang ini. Angka Harapan Hidup yang ada (melalui) lembaga seperti ini, adalah jenis data yang telah diproses dengan memenuhi keteria ilmiah yang dipersyaratkan (Asang, 2012:120).

Menghitung Indeks Kesehatan =

$$\text{Indeks kesehatan} = (\text{AHH} - \text{AHH min}) / (\text{AHH maks} - \text{AHH min}) \dots \dots \dots (2.1)$$

2.1.3. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

2.1.3.1. Pengertian Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak (Kato dkk, 2021:104). Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (BPS:2021).

Rumus Menghitung Indeks Harapan Lama Sekolah =

$$\text{Indeks Harapan Lama Sekolah} = (\text{HLS} - \text{HLS min}) / (\text{HLS maks} - \text{HLS min}) \dots\dots\dots (2.2)$$

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 2012:1). PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-

jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah (Bancin dan Usman, 2020:18).

Pertumbuhan ekonomi tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang (Boediono, 2012:1):

1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total nya (GDP) dan sisi jumlah penduduk nya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita, tidak bisa tidak, harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak.
3. Aspek yang ketiga adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu pertumbuhan

ekonomi tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 tahun, atau bahkan lebih lama lagi), mengalami kenaikan output per kapita.

2.1.4.2. Komponen-Komponen Pertumbuhan Ekonomi

Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang paling penting adalah sebagai berikut (Todaro dan Smith, 2011:170):

1. Akumulasi modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) akan terjadi jika sebagian tertentu dari pendapatan sekarang ditabung dan diinvestasikan untuk meningkatkan output dan pendapatan di masa depan. Pabrik, mesin, peralatan, dan bahan baru meningkatkan persediaan modal (*capital stock*) fisik suatu negara (total nilai riil neto semua barang modal fisik produktif) yang memungkinkan upaya mempertinggi tingkat output yang akan dicapai.

2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Dengan pemahaman awal mengenai dua komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui kurva kemungkinan produksi (*production possibility curve*) yaitu kurva dalam sebuah grafik yang menunjukkan kombinasi alternatif dua komoditas atau kategori komoditas (misalnya, barang pertanian atau barang manufaktur) yang dapat diproduksi jika semua faktor produksi digunakan secara efisien. Dengan ketersediaan sumber daya dan

teknologi, kurva itu menetapkan batas antara yang dapat dicapai dan yang tidak.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi (*technological progress*), kemajuan teknologi dalam bentuknya yang paling sederhana merupakan hasil dari peningkatan cara melaksanakan tugas-tugas tradisional seperti menanam tumbuhan, membuat pakaian, atau membangun rumah. Terdapat tiga klasifikasi dasar kemajuan teknologi: netral, hemat tenaga kerja (*labor saving*), dan hemat modal (*capital saving*).

Menghitung Laju Pertumbuhan PDRB

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana :

PDB/PDRB_t = PDB/PDRB tahun tertentu.

PDB/PDRB_{t-1} = PDB/PDRB tahun sebelumnya.

2.1.4.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi :

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historismus

1. Friedrich List

Menurut List, ada lima tahap perkembangan ekonomi didasarkan pada cara produksi suatu masyarakat yaitu (Arsyad, 2016:59):

- a. Tahap berburu atau barbarian, yang merupakan ciri masyarakat primitif di mana pada tahap ini masyarakat memenuhi kebutuhannya hanya dari alam (ekstraktif).
- b. Tahap beternak atau pastoral, di mana pada tahap ini sudah ada kegiatan beternak, namun masih bersifat nomaden.
- c. Tahap agraris, di mana pada tahap ini masyarakat mulai tetap dan bertani secara subsisten.
- d. Kombinasi antara tahap bertani dan industri manufaktur dan perdagangan, di mana pola-pola industri manufaktur dan perdagangannya masih dalam bentuk yang sederhana.
- e. Kombinasi antara tahap bertani dan industri manufaktur dan perdagangan, di mana pola-pola industri manufaktur dan perdagangannya sudah dalam bentuk yang maju.

2. Bruno Hilderbrand

Menurut Hilderbrand, perkembangan ekonomi dapat dibagi ke dalam tiga tahap yaitu (Arsyad, 2016:61) :

- a. Perekonomian Barter.
- b. Perekonomian Uang.
- c. Perekonomian Kredit.

Pemikiran Hilderbrand di atas dinilai cukup baik dalam perspektif kajian sosiologi, tetapi dirasa kurang bermakna apabila ditinjau dari perspektif ilmu ekonomi. Salah satu kelemahan mendasar dari pemikiran hilderbrand adalah seperti telah disinggung di muka bahwa hampir keseluruhan penelitiannya

hanya berupa monografi sejarah yang bersifat deskriptif tentang masalah-masalah ekonomi. Selain itu, Hilderbrand juga tidak menjelaskan secara terinci tentang proses evolusi dari satu tahap ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, karya-karya hilberbrand dinilai kurang bermakna bagi perkembangan ilmu ekonomi (Arsyad, 2016:61).

3. Karl Bucher

Menurut Bucher, perkembangan ekonomi akan melalui tiga tahap yaitu (Arsyad, 2016:61):

- a. Perekonomian subsisten, di mana produksi untuk keperluan sendiri.
- b. Perekonomian kota, di mana perdagangan sudah meluas.
- c. Perekonomian nasional, di mana peran pedagang menjadi semakin penting.

4. Walt Whitman Rostow.

Menurut Rastow (1959) (dalam Arsyad, 2016:62), proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan ke dalam lima tahap, yaitu: masyarakat tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk lepas landas (*the preconditions for take-off*), lepas landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*).

a. Masyarakat tradisional

Ciri ekonomi yang utama masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang strukturnya berkembang dengan fungsi produksi yang terbatas yang

terefleksikan pada skala dan pola perdagangan/pertukaran yang kecil dan tradisional, tingkat output pertanian dan produktivitasnya yang rendah, ukuran industri manufaktur yang kecil, fluktuasi penduduk yang tidak menentu, dan pendapatan riil yang rendah. Sektor pertanian yang produktivitasnya rendah tersebut menyerap lebih dari 75 persen angkatan kerja. Dengan kata lain, sektor pertanian masih merupakan sektor penyangga perekonomian yang utama. Dari aspek sosial, cara hidup masyarakat yang masih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebiasaan yang terkadang kurang rasional (Arsyad, 2016:63).

b. Tahap prasyarat lepas landas

Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai tahap pertumbuhan yang berkesinambungan dengan kekuatan sendiri (*self-sustained growth*). Menurut Rostow, secara otomatis fenomena pertumbuhan ekonomi akan senantiasa mengiringi tahap ini dan tahap sesudahnya (Arsyad, 2016:65).

c. Tahap lepas landas

Pada banyak negara, pertumbuhan ekonomi seringkali dipicu oleh perkembangan dari kegiatan ekonomi tertentu yang dapat digolongkan sebagai sektor ekonomi utama atau seringkali disebut dengan sektor-sektor pemimpin (*leading sectors*). Jenis industri atau kegiatan ekonomi yang menjadi sektor pemimpin berbeda untuk tiap negara. Di Inggris, tekstil merupakan sektor pemimpin pada tahap lepas landasnya, sedangkan transportasi (jaringan jalan kereta api) memegang peranan penting di Amerika Serikat, Perancis, Jerman,

Kanada, dan Rusia. Di beberapa negara, kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor primer yang menjadi sektor pemimpin, misalnya industri kayu di Swedia, peternakan di Denmark, industri sutera di Jepang, dan industri substitusi impor barang-barang konsumsi di Argentina. Oleh karena itu, Rostow menyimpulkan bahwa untuk mencapai tahap lepas landas tidak satu sektor ekonomi pun dapat dipandang sebagai sektor yang baku dalam pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya setiap negara mempunyai karakteristik dan kondisi domestik yang berbeda (Arsyad, 2016:67).

d. Tahap menuju kedewasaan

Dalam menganalisis karakteristik tahap menuju ke arah kedewasaan, Rostow menekankan analisisnya pada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sekarang ini dapat dikategorikan sebagai negara-negara maju. Dia juga menunjukkan bahwa setiap negara tersebut sektor pemimpin pada tahap ini berbeda dengan sektor pemimpin pada tahap sebelumnya (tahap lepas landas), (Arsyad, 2016:69).

e. Tahap Konsumsi Tinggi

Pada tahap ini, perhatian masyarakat lebih ditekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat (*demand side*), dan bukan lagi pada masalah produksi (*supply side*), (Arsyad, 2016:69).

B. Teori Klasik

1. Adam Smith

Menurut pandangan Smith, pengembangan hak milik (*property right*), spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis. Smith membagi sejarah peradaban manusia ke dalam empat tahap yaitu (Arsyad, 2016:73) :

- a. Tahap berburu (*hunting*). Pada tahap ini tidak dikenal adanya hak-hak milik secara eksklusif. Semua anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama, baik secara ekonomi maupun sosial, dan hanya ada sedikit struktur formal karena masyarakatnya bersifat nomaden.
- b. Tahap beternak (*pastoral*). Susunan masyarakat pada tahap ini hampir sama dengan susunan masyarakat pada tahap berburu, hanya saja struktur hak milik dan akumulasi kekayaannya sudah diperluas. Pada tahap ini, Smith menekankan tentang peranan kaum penggembala.
- c. Tahap pertanian (*agriculture*). Ada beberapa karakteristik struktur kehidupan pada tahap ini yaitu: persediaan makanan yang lebih stabil, spesialisasi meningkat, dan populasi lebih besar. Pada umumnya, masyarakat pada tahap ini sudah mulai tinggal menetap pada satu lokasi tertentu.
- d. Tahap perdagangan (*commerce*). Tahap ini ditandai dengan berkembangnya secara pesat pertumbuhan kota dan pusat-pusat perdagangan.

2. David Ricardo

Dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* (1817), Ricardo mengungkapkan beberapa teori penting yaitu (Arsyad, 2016:79):

- a. Teori tentang nilai dan harga barang.

- b. Teori tentang distribusi pendapatan atas faktor-faktor produksi yang diuraikan dalam teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan teori laba.
- c. Teori tentang perdagangan internasional.
- d. Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

C. Mazhab Keynesian

1. Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yakni (Arsyad, 2016:83): Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh (*full utilization*), Perekonomian terdiri dari dua sektor: sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional, Kecenderungan menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*).

D. Teori Pertumbuhan Neoklasik

1. Solow-Swan

Menurut teori Solow-Swan ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (*technological progress*). Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor

produksinya. Dengan kata lain, perekonomian akan terus berkembang dan semuanya itu tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal output (*capital-output ratio*) dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika lebih banyak modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, dan sebaliknya (Arsyad, 2016:88).

E. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori ini dengan jelas menggambarkan tentang bagaimana akumulasi modal tidak mengalami *diminishing returns*, namun justru akan mengalami *increasing returns* dengan adanya spesialisasi dan investasi di bidang SDM dan ilmu pengetahuan. Menurut Romer (1994) (dalam Arsyad, 2016:93), teori pertumbuhan endogen mempunyai tiga elemen dasar yaitu:

- a. Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan.
- b. Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan (*knowledge spillover*).
- c. Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.

F. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha (*entrepreneurs*). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa

diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneurs*. Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan output total masyarakat.

Menurut Schumpeter (dalam Arsyad, 2016:97), inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu:

- a. Diperkenalkannya “teknologi” baru.
- b. Menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolistis) yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal.
- c. Inovasi akan selalu diikuti oleh timbulnya proses peniruan (imitasi) yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut.

G. Teori Ketergantungan

Theotonio Dos Santos (1970) (dalam Arsyad, 2016:101), seorang pakar teori ketergantungan lainnya, mengklasifikasikan ketergantungan ke dalam tiga jenis:

- a. Ketergantungan Kolonial (*Colonial Dependence*).
- b. Ketergantungan kolonial adalah ketergantungan yang ditandai oleh bentuk hubungan perdagangan pada zaman penjajahan, di mana kekuatan-kekuatan kaum elite di dalam negeri (para tuan tanah, pemilik modal dan pengusaha) beraliansi dengan pemerintahan kolonial, dan kemudian mendominasi hubungan-hubungan ekonomi antara negara penjajah dan negara jajahan melalui sistem perdagangan monopoli yang dilengkapi dengan sistem monopoli pengusaha tanah dan lahan-lahan pertanian, pertambangan, tenaga kerja oleh pemerintah kolonial.

- c. Ketergantungan Industri keuangan (*Industrial-Financial Dependence*).
- d. Ketergantungan industri keuangan di mulai pada akhir abad ke-19, hal tersebut ditandai dengan adanya dominasi arus modal asing oleh negara-negara penjajah. Modal asing tersebut berwujud investasi secara besar-besaran pada sektor-sektor kunci di negara-negara jajahan. Konsekuensinya, struktur produksi di negara-negara jajahan tumbuh untuk melayani hastrat negara-negara penjajah.
- e. Ketergantungan Teknologi Industri (*Industrial Financial Dependence*).
- f. Ketergantungan teknologi berkembang setelah Perang Dunia ke-2, di mana negara-negara maju melalui perusahaan-perusahaan multinasional mereka miliki melakukan investasi secara besar-besaran di sektor industri untuk memenuhi pasar dalam negeri di NSB. Hampir keseluruhan industri baru di NSB secara teknis produksi sangat tergantung pada negara-negara maju. Dalam pandangan teori ini, ada hubungan yang tidak seimbang antara negara-negara maju (core) dan NSB (periphery) sehingga praktik eksploitatif terhadap NSB pun senantiasa menyertai hubungan mereka. Namun di sisi lain, hubungan tersebut juga menimbulkan ketergantungan NSB terhadap negara-negara maju.

2.1.5. Jumlah Penduduk Miskin

2.1.5.1. Pengertian Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Revallion (2001) (dalam Arsyad, 2016:299), kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu

bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS: 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi yang dialami dalam kehidupan secara bermartabat kegagalan dalam perbedaan perlakuan seseorang atau sekelompok masyarakat dan pemenuhan hak dasar. Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau keluarga yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi: kesehatan, pekerjaan, air bersih, sumber daya alam, rasa aman, kebutuhan pangan, pendidikan, pertanahan, perumahan, lingkungan hidup, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan sosial. Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 mengeluarkan laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat menerangkan bahwa mereka yang memiliki pendapatan namun tidak dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok/dasar walaupun memiliki pekerjaan, maka termasuk dalam kondisi miskin (Fatimah dan Sa'roni, 2020:588).

Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki

keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang luas yang memasukkan aspek sosial dan moral (Sholeh 2010). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional (Hamudy 2008). Menurut Kurniawan (2004) kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak (Khomsan dkk, 2015:1).

Chambers (2001) (dalam Khomsan dkk, 2015:2) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*proverty*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

2.1.5.2. Bentuk Kemiskinan

Menurut Chambers (dalam Khomsan dkk, 2015:3) kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu :

1. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.1.5.3. Ciri Masyarakat Miskin

Fernandez (2001) (dalam Arsyad, 2016:300) menambahkan tentang beberapa ciri masyarakat miskin ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

1. Aspek politik : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.

2. Aspek sosial : rendahnya dari institusi utama masyarakat yang ada.
3. Aspek ekonomi : rendahnya kualitas SDM, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan, dan rendahnya kepemilikan atas aset fisik, termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.
4. Aspek budaya atau nilai : terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.

Rumus Persentase Penduduk Miskin:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana :

A = 0.

Z = Garis kemiskinan.

Y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3, ..., q), y_i < z.

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = Jumlah penduduk.

2.1.5.4. Konsep Dan Indikator Kemiskinan

Menurut Sajogyo, pada awal tahun 1970-an. Sajogyo menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Sajogyo membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah perdesaan dan

perkotaan. Untuk daerah perdesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun. Penentuan kemiskinan dengan hanya menggunakan beras sebagai kriteria memiliki kelemahan antara lain: beras bukanlah makanan pokok semua suku di Indonesia, tidak diketahui jenis-jenis makanan lain yang dikonsumsi penduduk, dengan hanya melihat beras kualitas makanan lain belum dapat terlihat (Khomsan dkk, 2015:11).

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *head count index (HCI)*, yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Selain melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin dalam analisis tentang penduduk miskin, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga miskin berdasarkan karakteristik sosial demografis, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan lain-lain (Khomsan dkk, 2015:13).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survai juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB), yaitu “Keluarga yang Berkualitas”. Untuk menghitung tingkat

kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, (Khomsan dkk 2015:14).

Ukuran lain kemiskinan dikembangkan oleh BKKBN, yang menggunakan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Dalam ukuran ini, sebuah keluarga disebut miskin jika: tidak bisa melakukan kewajiban-kewajiban rutin dalam agamanya, tidak bisa makan dua kali dalam sehari, tidak mempunyai pakaian lain untuk bekerja/bersekolah dan melakukan aktivitas lainnya, tinggal di rumah yang sebagian besar ruangnya berlantai tanah, tidak bisa membayar biaya fasilitas kesehatan (Khomsan dkk, 2015:16).

Menurut Bank Dunia (2003) (dalam Khomsan dkk, 2015:17), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
5. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional vs ekonomi modern).
6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.

7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya.
8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good govermence*).
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.2. Teori Hubungan

2.2.1. Hubungan Angka Harapan Hidup Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Todaro dan Smith, 2011 (dalam Fatimah dan Sa'roni, 2020:589) kesehatan memiliki arti yang sangat penting bagi kesejahteraan, karena sangat fundamental kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Selain itu, kesehatan juga merupakan sebagai prasyarat bagi peningkatan produktivitas, karena tenaga kerja yang memiliki mental dan fisik yang sehat akan lebih prima dan produktif dalam mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga distribusi kesehatan sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Dengan meningkatkan angka harapan hidup suatu masyarakat mengisyaratkan tingginya derajat kesehatan masyarakat di daerah tersebut, tetapi angka harapan hidup jauh lebih rendah di kalangan orang-orang miskin.

Lingkaran kemiskinan menerangkan bahwasanya kesehatan penduduk semakin meningkat dapat diketahui dari angka harapan hidup yang meningkat. Produktivitas penduduk bertambah mendorong laju perkembangan ekonomi

sehingga kemiskinan menurun, angka harapan hidup yang terus meningkat dapat menekan penduduk miskin (Dewi dkk 2020:86).

Teori lingkaran kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan yang menyatakan bahwa kesehatan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup. Tingkat produktivitas masyarakat meningkat dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi angka harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun (Anggadini, 2019:46).

Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan (Haryadi dan Ismawati, 2018:144).

Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan, selain itu kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas (Todaro dan Smith, 2011:445), kesehatan dan nutrisi memengaruhi lapangan kerja, produktivitas, dan upah, pengaruh itu sangat substansial di kalangan orang-orang yang sangat miskin. Mengedepankan pentingnya prioritas kebijakan kesehatan dalam pembangunan, kesehatan bukan hanya tujuan utama itu sendiri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap tingkat pendapatan. Setelah melakukan telaah literatur mendalam serta

analisis statistik dan data yang rumit, Strauss dan Thomass menyimpulkan bukti menunjukkan pengaruh positif peningkatan nutrisi terhadap upah, setidaknya di kalangan orang-orang yang kurang nutrisi. Dengan demikian, kita dapat lebih yakin menyatakan bahwa penduduk yang sehat merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berhasil (Todaro dan Smith, 2011:493).

Sebagian besar pengaruh kesehatan terhadap peningkatan penghasilan adalah karena perbedaan produktivitas. Hal ini bukan sekadar pembalikan hubungan kausalitas bahwa upah lebih tinggi digunakan untuk menghasilkan kesehatan yang lebih baik. Sebuah studi yang dilakukan di Bangladesh menemukan bahwa lebih tingginya produktivitas para pekerja yang lebih sehat memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik (Todaro dan Smith, 2011:493).

Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas rendah, tingkat produktivitas yang rendah lebih menyebabkan pendapatan rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan (Rahmadana dkk, 2020:33).

Menurut Myrdal, keadaan miskin bermula dari pendapatan yang rendah, sehingga kualitas gizi menjadi kurang. Rendahnya kualitas gizi tersebut menyebabkan rendahnya kesehatan yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas rendah ini menyebabkan pendapatan yang rendah, dan pada gilirannya menyebabkan kemiskinan (Damanhuri dan Findi, 2014:47).

Distribusi kesehatan dan pendidikan dalam suatu negara sama pentingnya dengan distribusi pendapatan, tingkat harapan hidup mungkin cukup tinggi bagi orang-orang yang lebih beruntung di negara-negara berkembang, tetapi jauh lebih rendah di kalangan orang-orang miskin. Tingkat mortalitas anak-anak di negara berkembang masih sepuluh kali lebih tinggi dari pada yang terjadi di negara maju. Kematian ini umumnya terjadi akibat kondisi yang sebenarnya mudah ditangani, mencakup jutaan orang yang meninggal sia-sia setiap tahun setelah mengalami dehidrasi karena diare. Jika tingkat kematian anak di negara-negara berkembang dapat diturunkan seperti halnya negara maju, kehidupan dari lebih 8 juta anak-anak akan dapat diselamatkan setiap tahun (Todaro dan Smith, 2011:446).

2.2.2. Hubungan Angka Harapan Lama Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga, pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan sangat penting artinya dalam pembangunan ekonomi. Distribusi pendidikan dalam suatu negara sama pentingnya dengan distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2011:445).

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi penghasilan yang diharapkannya sehingga lebih besar dari biaya-biaya pribadi yang harus

dikeluarkan. Untuk memaksimalkan selisih antara pendapatan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan akan muncul atau tingkat pengembalian individual dari investasi pendidikan (*private rate of return to investment in education*), maka strategi optimal yang tersedia bagi orang bersangkutan adalah berusaha menempuh pendidikan yang setinggi mungkin (Todaro dan Smith, 2006:458).

Menurut Todaro dan Smith, 2011 (dalam Fatimah dan Sa'roni.2020:588) pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang berharga dan memuaskan, karena pendidikan salah satu tujuan dari pembangunan yang mendasar. Pendidikan juga bersifat esensial bagi kehidupan, karena sangat fundamental kaitannya terhadap gagasan yang lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Distribusi pendidikan dalam suatu negara sama pentingnya dengan distribusi pendapatan. Apabila seseorang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi maka orang tersebut dapat memperoleh pendapatan yang optimal dari barang dan jasa yang dihasilkannya secara optimal. Apabila pendapatan masyarakat tinggi maka akan terhindar dari kemiskinan karena seluruh kebutuhannya terpenuhi.

Menurut Simmons (dalam Didu dan Fauzi, 2016:111), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang mengharapkan pekerjaan baik serta penghasilan yang tinggi hanya mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke

tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Menurut Rambe (2005) (dalam Iskandar, 2012:21), pendidikan dan kesejahteraan merupakan dua variabel yang saling memengaruhi. Di satu sisi, perubahan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkat kesejahteraan, sedangkan di lain pihak tingkat kesejahteraan signifikan terhadap perkembangan pendidikan. Tingkat pendidikan akan memengaruhi tingkat pendapatan keluarga karena setiap kali kenaikan tingkat pendidikan, akan mendorong tingkat pendapatan yang bisa melampaui garis kemiskinan.

Menurut Mankiw, pendidikan penduduk harus menjadi perhatian penting dalam suatu negara guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Mankiw menjelaskan bahwa kemajuan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari investasi manusia dan nantinya penduduk yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi akan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Semakin tingginya pendapatan penduduk maka akan mengurangi angka kemiskinan di negara tersebut karena masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka (Marit dkk, 2021:129).

Pada saat seorang peserta didik menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka pengembalian pribadi yang diharapkan meningkat jauh lebih cepat dari pada biaya pribadi. Untuk memaksimalkan antara manfaat dan biaya yang diharapkan (dan dengan demikian pengembalian pribadi atas investasi pendidikan), strategi optimal yang perlu dilakukan peserta didik adalah mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Di mana pengembalian dan biaya

sosial diplotkan terhadap lamanya sekolah yang diselesaikan. Pada awalnya, kurva manfaat sosial meningkat tajam yang menunjukkan meningkatnya produktivitas. Sebagai akibat dari perolehan pendidikan dasar dan kemampuan membaca, berhitung, dan keterampilan vokasi dasar. Setelah itu, laju peningkatan manfaat sosial marginal meningkat semakin lamban dengan bertambahnya pendidikan, dan kurva pengembalian sosial pun mulai mendatar. Sebaliknya, kurva biaya sosial menunjukkan kenaikan lamban pada tingkat awal pendidikan (pendidikan dasar), dan kemudian meningkat lebih cepat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Todaro dan Smith, 2011:470).

2.2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Kuznet (dalam Didu dan Fauzi, 2016:112), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Menurut Kuznet, Tambunan 2014 (dalam Fatimah dan Sa'roni, 2020:589), pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan yang cenderung meningkat akan tetapi pada saat mendekati tahap akhir terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan, jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dimana

apabila pertumbuhan mengalami kenaikan maka kemiskinan mengalami penurunan dan begitupun sebaliknya.

Menurut Kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan atau kesejahteraan cenderung memburuk. Namun tahap berikutnya, distribusi pendapatan tersebut akan membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk, lalu kemudian pada tahap berikutnya mulai membaik. Sebagian besar mengaitkannya dengan kondisi struktural perekonomian tersebut (Arsyad, 2016:292).

Dengan menggunakan acuan kerangka model dua sektornya Lewis, kita dapat menjelaskan tentang mengapa pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya terpusat di sektor modern. Pada tahap ini, lapangan kerjanya terbatas, namun tingkat upah dari produktivitasnya terhitung tinggi. Ada kesenjangan pendapatan antara sektor modern dan sektor tradisional yang pada awalnya akan semakin melebar dalam waktu yang singkat, namun pada akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan di sektor modern relatif lebih tinggi dari pada yang terjadi di sektor tradisional (sektor tradisional relatif stagnan). Selain itu, pada tahap ini, langkah-langkah transfer pendapatan dan berbagai kebijakan lainnya yang diarahkan untuk mengurangi ketimpangan akan menemui jalan buntu, karena terbatasnya dana pemerintah sehubungan dengan masih relatif rendahnya pendapatan nasional yang dimiliki (Arsyad, 2016:292).

Teori kemiskinan Kutnez yang berpendapat bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menyerupai huruf U terbalik (*inverted U*

hypothesis). Pada saat pertumbuhan ekonomi rendah, kemiskinan akan tinggi, dan kemudian menurun kembali sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2020:260).

Hasil sudi penelitian Kakwani dan Son (2000) yang menyimpulkan pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dengan kemiskinan, artinya pertumbuhan ekonomi yang positif mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian Kakwani dan Son menguatkan dugaan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dapat mengurangi angka kemiskinan (Hidayat, 2020:257).

Barrios & Strobi (2006) (dalam Arsyad, 2016:293), menuliskan laporan penelitian tentang hubungan antara kesenjangan antarwilayah dengan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data Produk Domestik Bruto negara-negara Uni Eropa yang diolah dengan metode ekonometrik untuk menjelaskan pola hubungan antara PDB dengan kesenjangan antarwilayah yang berbentuk kurva huruf U terbalik.

Hasil penelitian ini memberikan bukti kuat bahwa untuk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa memiliki pola kesenjangan wilayah yang terbentuk kurva huruf “U” terbalik. Temuan ini sejalan dengan temuan Kuznets. Temuan lain dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel yang berkaitan dengan kebijakan penggabungan ekonomi negara Uni Eropa antara lain struktur anggaran negara, desentralisasi fiskal, dan mekanisme redistribusi jaminan sosial memberi dampak terhadap kesenjangan antarwilayah (Arsyad, 2016:293).

Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada awal tahapan pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk hanya pada tahapan berikutnya distribusi itu akan membaik. Dikenal dengan sebutan kurva Kuznetz (*kuznets curve*) “U-terbalik” yaitu sebuah grafik yang menggambarkan hubungan antara pendapatan per kapita dan pemerataan distribusi pendapatan di suatu negara. Dengan adanya pola perubahan longitudinal (deret waktu) dalam distribusi pendapatan yang diukur misalnya, dengan koefisien Gini kurvanya tampak seperti berbentuk U terbalik, seiring kenaikan GNI per kapita dalam beberapa studi yang dilakukan Kuznets (Todaro dan Smith, 2011:277).

Penjelasan tentang mengapa ketimpangan semakin memburuk selama tahapan awal pertumbuhan ekonomi sebelumnya akhirnya meningkat cukup banyak. Semua penjelasan itu selalu berkaitan dengan hakikat perubahan struktural. Dalam model Lewis, dikonsentrasikan pada sektor industri modern yang kesempatan kerjanya terbatas tetapi tingkat upah dan produktivitasnya tinggi. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang memperluas sektor modern ketika suatu negara bergerak dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern (Todaro dan Smith, 2011:277).

2.3. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Candrawati dkk. (2021)	“Pengaruh Upah Minimum, Harapan Hidup, Lama Sekolah Dan Dependency Ratio Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2019”. Vol.9, No.3, Agustus 2021. E. ISSN.2614-6061, P.ISSN.2527-4295.	Variabel yang diteliti adalah upah minimum, harapan hidup, harapan lama sekolah dan dependency ratio (DR) terhadap jumlah penduduk miskin. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) penelitian ini dilakukan dalam waktu 10 tahun, yakni pada tahun 2010 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara upah minimum, usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan dependensi rasio terhadap jumlah penduduk miskin. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa upah minimum, usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan dependensi rasio tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Koefisien determinasi (R^2) pada model yaitu 0,869. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh upah minimum, usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan dependensi rasio terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 86,9% sedangkan sisanya sebesar 13,1% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan penelitian kuantitatif dan data bersumber dari Badan Pusat Statistik Sama-sama menggunakan variabel harapan hidup, harapan lama sekolah terhadap jumlah penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Objek penelitian di Kabupaten Kebumen. Menggunakan variabel independen upah minimum dan dependency ratio Penelitian dilakukan dalam waktu 10 tahun, pada tahun 2010 hingga 2019.
2	Finkayana dan Dewi (2016)	“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali tahun 2004-2013”. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.5, No. 7 Juli 2016.	Variabel yang diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil uji secara parsial pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran per kapita masing-masing dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali secara negatif	<ul style="list-style-type: none"> Sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif Sama-sama menggunakan variabel independent pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Objek penelitian di Provinsi Bali. Menggunakan variabel independent rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan

			<p>dan signifikan. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita serempak memengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali secara signifikan. Dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,636. Menunjukkan sebanyak 63% jumlah penduduk miskin dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita, sedangkan sebesar 37% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian.</p>	<p>miskin.</p>	<p>pengeluaran perkapita.</p>
3	<p>Fatimah dan Sa'roni (2020)</p>	<p>“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut”. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol.3, No.2, 2020. ISSN : 2746-3249</p>	<p>Variabel yang diteliti adalah Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang diambil secara kurun waktu (Time Series) yaitu tahun 2010-2018 lokasi yang digunakan adalah Kabupaten Tanah laut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. dan secara simultan tingkat pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. uji koefisien determinan (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,772557 berarti sebesar 77,25% dari variabel tingkat pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin. sedangkan 22,75% dari variabel jumlah penduduk miskin dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diukur atau diteliti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. • Sama-sama menggunakan variabel independent angka harapan hidup, pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian di Kabupaten Tanah Laut. • Menggunakan variabel independent rata-rata lama sekolah • Data yang diambil secara kurun waktu (time series) yaitu tahun 2010-2018.

4	Dewi dkk, (2020)	<p>“Analisis Determinan Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018”.</p> <p>Directory Jurnal Of Economic Volume 2 Nomor 1, 2020.</p>	<p>Variabel yang diteliti adalah Angka Harapan Hidup, PDRB Perkapita, Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi analisis data panel dan data sekunder yang mencakup gabungan cross section dan time series. Berdasarkan hasil analisis angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, jumlah pengangguran terbuka tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penduduk miskin. Angka harapan hidup, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran terbuka berpengaruh secara bersamaan terhadap penduduk miskin. Dalam perhitungan nilai adjusted R-Square sebesar 0,990570 atau 99.0579% dapat diartikan setelah terkoreksi nilai standar error angka harapan hidup, PDRB perkapita dan jumlah pengangguran terbuka mampu menjelaskan penduduk miskin sebesar 99.0579%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan variabel independent Angka Harapan Hidup. • Sama-sama menggunakan metode regresi analisis data panel dan data sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian di Provinsi Jawa Tengah. • Menggunakan variabel independent PDRB Perkapita dan Pengangguran Terbuka
5	Pramesti dan Bendesa (2018)	<p>“Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali”.</p> <p>E-Jurnal EP Unud Vol.7, No.9, September 2018. ISSN : 2303-0178</p>	<p>Variabel yang diteliti adalah Angka Harapan Hidup, Pendidikan, Pendapatan Perkapita, Pengangguran Terhadap Kemiskinan. Metode penelitian menggunakan metode observasi non partisipan yang berjenis kausalitas dengan lokasi di Provinsi Bali, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan metode time series selama 17 tahun (2000-2006). Berdasarkan hasil analisis angka harapan hidup secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendapatan perkapita secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kemiskinan, dan berdasarkan uji simultan angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan variabel independent angka harapan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian di Provinsi Bali. • Menggunakan variabel independent pendidikan, pendapatan perkapita, pengangguran. • Metode penelitian menggunakan metode observasi non partisipan

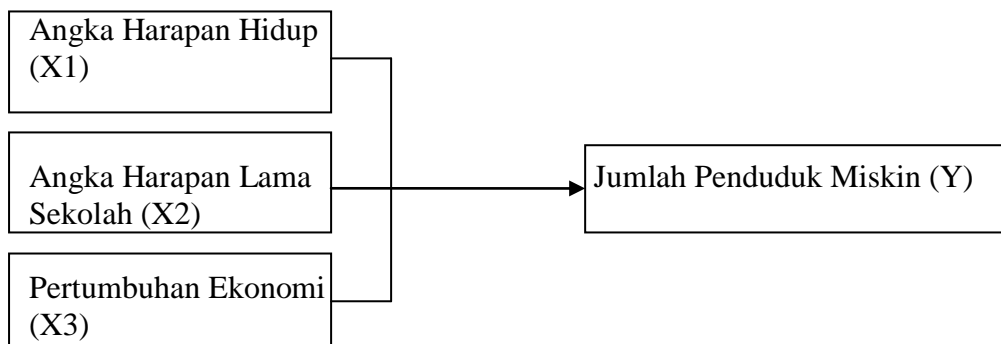
			determinasi atau $R^2 = 0,790$ mempunyai arti bahwa 79% kemiskinan Provinsi Bali dipengaruhi oleh angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran, sedangkan sisanya 21% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model tersebut		yang berjenis kausalitas
6	Haryadi dan Ismawati (2018)	“Analisis Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2016”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 15 No 2, Agustus 2018. ISSN (P) : 2089-1210, E-ISSN : 2580-7285.	Variabel yang diteliti adalah Pertumbuhan PDRB, Kesempatan Kerja, Melek Huruf, Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan data sekunder berbentuk data runtut waktu (time series) dengan rentang waktu 7 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Angka harapan hidup berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan variabel independent pertumbuhan ekonomi dan harapan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian di Kabupaten Sumbawa. • Penelitian menggunakan data time series
7	Anggadini (2015)	“Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2013”. Volume 3, Nomor 7, Juli 2015. ISSN : 2302-2019.	Variabel yang diteliti adalah Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan. Metode Penelitian menggunakan model regresi data panel dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan pendapatan domestik regional bruto perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, angka melek huruf tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan uji F pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan domestik regional bruto perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan variabel independent angka harapan hidup. • Sama-sama menggunakan model regresi data panel dan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian pada Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. • Menggunakan variabel independent angka melek huruf, tingkat pengangguran terbuka, pendapatan perkapita.

			Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,8853, angka ini menunjukkan bahwa 88.53% variasi kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dapat dijelaskan oleh empat variasi variabel independennya yakni angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan domestik regional bruto perkapita, sedangkan sebesar 11,47% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.		
8	Didu dan Fauzi (2016)	“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak”. Vol. 6, No. 1, April 2016. P-ISSN : 2089-4473. E-ISSN : 2541-1314	Variabel yang diteliti adalah Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS) dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian di Kabupaten Lebak. • Menggunakan variabel independent jumlah penduduk dan pendidikan. • Menggunakan teknik analisis model kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS)
9	Aristin, dkk, (2017)	“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali”. E-Jurnal EP Unud, Vol.6, No.5, Mei 2017. ISSN : 2303-0178	Variabel yang diteliti adalah Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, variabel pengangguran secara parsial	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independent. • Sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linear berganda data 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian di Provinsi Bali. • Menggunakan variabel independent pendidikan dan pengangu

		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien determinasi (R ²) sebesar 0,5327 yang memiliki arti bahwa 53,27% variasi dari kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 1995-2014 dijelaskan oleh pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 46,73% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.	yang digunakan adalah data sekunder.	ran
--	--	--	--------------------------------------	-----

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka pemikiran berikut menggambarkan hubungan antara variabel independen, dalam hal ini adalah Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi. Variabel dependen yaitu Jumlah Penduduk Miskin. Kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Dari kerangka pemikiran di atas dapat diartikan secara parsial ada pengaruh Angka Harapan Hidup (X1) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y), Angka Harapan Lama Sekolah (X2) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y), Pertumbuhan Ekonomi (X3) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y). Dan secara simultan dapat diartikan ada pengaruh Angka Harapan Hidup (X1), Angka Harapan Lama Sekolah (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y).

2.1. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa ada pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020 baik secara parsial maupun secara simultan.

